

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syaria'ah**

Disusun Oleh:

JENI FITRIA

NPM: 1221020064

Program Studi : Jinayah Siyasah

Pembimbing I : Dr.H.Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H /2017 M**

ABSTRAK

Kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan hutan yang setiap tahun terjadi di Indonesia. Kerusakan hutan diperparah dengan maraknya aksi pembakaran hutan. Masalah pembakaran hutan merupakan masalah serius sektor kehutanan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang sektor lainnya yang mengatur kejahatan ini masih belum maksimal dalam melakukan penegakan hukum yang mengakibatkan masih bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk melakukan kejahatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Pertama, Bagaimana sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan? Kedua, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam UU No 41 Tahun 1999? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sanksi dari Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap tindak pidana pembakaran hutan menurut UU No 41 Tahun 1999. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), dengan teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber literatur yang tersedia diperpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Setelah itu peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode berfikir induktif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Dalam sanksi pidana pembakaran hutan diatur dalam pasal 78 yakni barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus rupiah). Didalam hukum islam perbuatan kebakaran hutan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* sehingga aturan mengenai sanksi hukuman terhadap pelakunya sudah diatur didalamnya. Dalam hukum islam pengaturan tentang pelaku pembakaran hutan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, dimana semua ketentuannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) yang dalam hal ini adalah Hakim. Hakim dalam hal ini, dapat memutuskan hukuman atau sanksi yang sesuai kadar dari seberapa besar dampak dan kerusakan yang terjadi agar supaya kejahatan pembakaran hutan dapat dicegah dan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pelajaran bagi masyarakat umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : SANKSI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Nama : Jeni Fitria
Npm : 1221020064
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syariah**

DISETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

**Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001**

Ketua Jurusan Jinayah Siyasah

**Drs. Susiadi AS, M. Sos.i
NIP. 195808171993031002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **SANKSI TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM** disusun oleh **Jeni Fitria,
NPM. 1221020064**, Jurusan Jinayah Siyasa, telah diujikan
dalam sidang Munagasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan
Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 April 2017

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Jayusman, M. Ag

Sekretaris : Gatot Aji Bintaro, M.E.Sy

Penguji I : Eni Karim, S.H., M.Hum.

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP.197009011997031002**

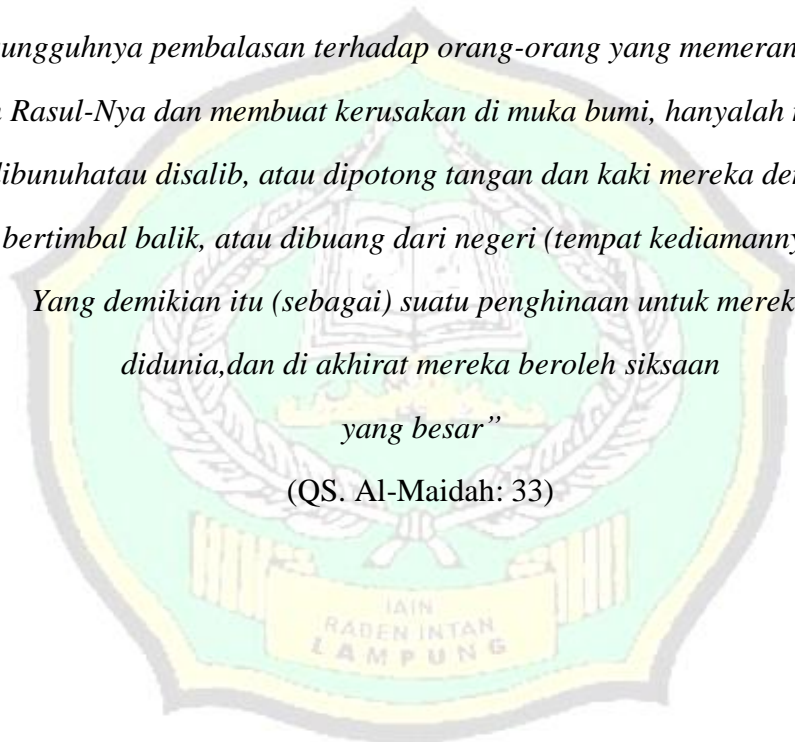
MOTTO

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”

(QS. Al-Maidah: 33)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis hanturkan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan akal dan semangat untuk senantiasa bertawakal dengan penuh rasa syukur tulus ikhlas maka skripsi ini kupersembahkan kepada:

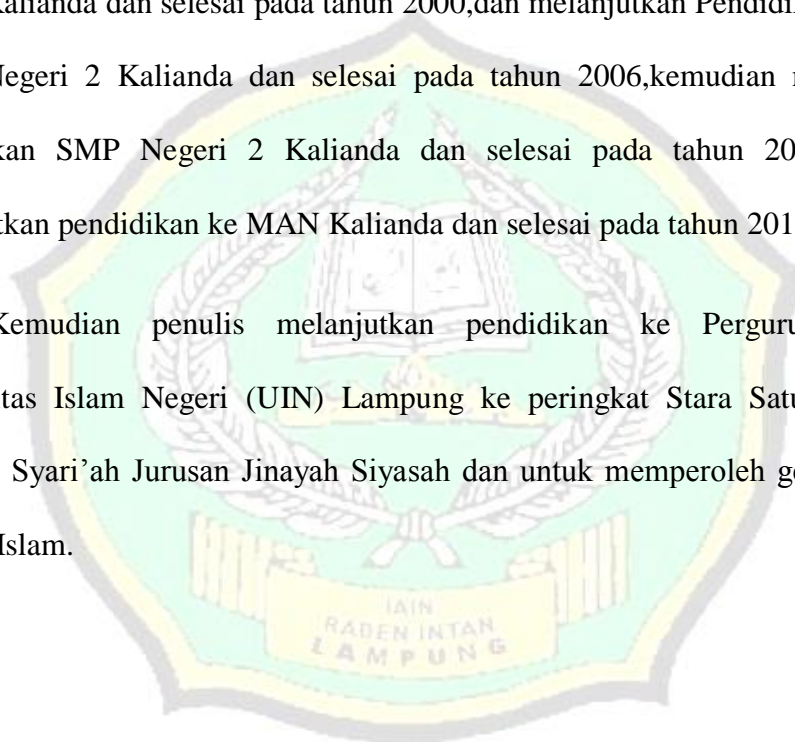
1. Kedua orang tuaku tercinta (Alm Ayahanda Armaini dan ibunda Sukarti), yang selalu menuntunku dalam akhlaq Islam, yang selalu mendoakan setulus hati pada setiap langkah dan tujuanku yang mencintai dan menyangiku tanpa kenal letih untuk memberikan kebahagiaan, dahulu, sekarang, dan sampai kapanpun.
2. Abangku Azwardi, kakakku Romi Yanti, dan kakakku Linda Octavia, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepadaku agar selalu bersemangat dalam segala hal. Serta keponakan-keponakanku yang selalu memberikanku kebahagiaan dalam waktu mengerjakan skripsi.
3. Fajar wahyudi yang selalu memberikan semangat serta motivasi hingga saat ini.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2012 yang saling memberikan motivasi dan seluruh dosen yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Jeni Fitria dilahirkan di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 11 Januari 1994, merupakan anak keempat dari empat bersaudara, pasangan dari ayahanda Alm.Armaini dan Ibunda Sukarti.

Jenjang pendidikan diawali dari Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kalianda dan selesai pada tahun 2000, dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kalianda dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan SMP Negeri 2 Kalianda dan selesai pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan ke MAN Kalianda dan selesai pada tahun 2012.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung ke peringkat S1 pada Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.



KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirahim,

Segala puji syukur penulis pajatkan kehadiran Allah SWT karena berkat hidayah-Nya skripsi ini dapat selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi dan Rasul Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **“SANKSI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”**penulis skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Hukum Islam (S.H.I) dalam ilmu Syari’ah.

Dalam kesempatan ini pula, menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Drs. Susiadi AS, M. Sos.i selaku Ketua Jurusan dan Bapak Frenki, M.Si., selaku seketaris jurusan Siyasah (hukum tatanegara) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku pembimbing I, dan Bapak Marwin, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Segenap dosen yang telah ikhlas mencurahkan ilmunya khususnya dosen-dosen di jurusan Jinayah Siyasah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmunya sehingga dapat membuat dan menyelesaikan skripsi.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi,data,referensi,penulis buku-buku yang menjadi bahan acuan dalam penyelesaian penelitian ini dan lain-lain.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai
8. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga amal baik bapak/ibu serta semua pihak akan diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bagi para penegak hukum.

Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin serta dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi sederhana ini memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin Yarobbal' Alamin.*

Bandar Lampung, April 2017
Penulis

JENI FITRIA
NPM.1221020064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II SANKSI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN	
A. Gambaran Umum Tentang Kejahatan Pembakaran Hutan.....	12
1. Pengertian Pembakaran Hutandan Jenis Tindak Pidana Kehutanan.....	12
2. Dasar Hukum Pembakaran Hutan dan Faktor-faktor Penyebab Pembakaran Hutan.....	16
3. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Kehutanan.....	45
B. Ketentuan Tentang Jarimah Tindak Pidana Pembakaran Hutan....	51
1. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Hutan.....	51
2. Jenis-jenis Jarimah.....	57
3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Merusak Hutan dalam Islam.....	58
BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN	
A. Deskripsi Isi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.....	61
B. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.....	64
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pelaku Pembakaran Hutan.....	90
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Sanksi Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang	

No. 41 Tahun 1999.....	92
B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Sebagaimana Diatur dalam Undang- Undang No. 41 Tahun 1999.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. “ **Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam**”

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan yaitu sebagai berikut:

Tindak Pidana adalah merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Disamping istilah tindak pidana di dalam bahasa Indonesia, ada beberapa istilah lain yang di pakai oleh beberapa sarjana hukum, diantaranya “peristiwa pidana” dan “perbuatan pidana”. Tindak pidana menurut Moeljatno adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”.¹

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita. Jakarta, 2004, h. 54

Pembakaran Hutan adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, Pembakaran hutan yang penjalarnya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.² Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran hutan dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib di syukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.³

Hukum Islam Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi adalah koneksi daya upaya para ahli hukum (*fuqoha*) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.⁴ Hukum Islam menurut ulama ushul adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku

²Saharjo, B.H. 2003. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlu dilakukan. Departemen Silviculture. Fakultas Kehutanan.

³ Abdul Muis Yusuf. Mohammad Taufik Makarao. *Hukum kehutanan Di Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h. 2

⁴ Hasby Ash-Shiddiqi, *falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. 1975

manusia muallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu pengkajian peraturan dan seperangkat peraturan yang didasarkan pada Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan mengenai sanksi tindak pidana pembakaran hutan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini sebagai berikut:

1. Akibat kebakaran hutan banyak aktivitas manusia yang terganggu hingga terpaksa berhenti mulai dari sekolah hingga perdagangan. Oleh karena itu juga berdampak buruk pada peputaran ekonomi di wilayah sekitar, hingga mengalami kerugian. Dan banyak anak-anak yang mengalami gangguan pernafasan akibat kabut asap yang tebal.
2. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan permasalahan dalam tindak pidana pembakaran hutan dan masyarakat belum mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan, sehingga penulis berminat untuk mengkaji hal tersebut secara ilmiah dalam penelitian ini.
3. Aspek bahasan judul skripsi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari di bangku kuliah khususnya jurusan Jinayah Siyasah (JS)

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1, Cetakan Keenam*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, h. 5

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, dan literature yang diperlukan penulis tersedia di ruang perpustakaan.

C. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai salah satu bagian dari Lingkungan Hidup merupakan karunia Allah SWT dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara kesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.⁶

Indonesia mempunyai hutan tropis dengan luas terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire, sehingga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan agar tetap dapat berfungsi sebagai paru-paru dunia. Luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012 mencapai 130,61 juta ha. Kawasan tersebut diklasifikasi sesuai dengan fungsinya menjadi kawasan konservasi (21,17 juta ha), kawasan lindung (32,06 juta ha), kawasan produksi terbatas (22,82 juta ha), kawasan produksi (33,68 juta ha) dan kawasan produksi yang dapat dikonversi (20,88 juta ha). Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6 % dari total luas daratan Indonesia sehingga menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang rawan terjadi kerusakan karena kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat kerusakan hutan di Indonesia tahun 2012 mencapai 0,45 terbagi menjadi kerusakan kawasan

⁶Abdul Muis Yusuf. Mohammad Taufik Makarao. *Opcit*, h. 2

hutan 0,32 dan di luar kawasan hutan 0,13 per tahun. (Kementerian Kehutanan, 2012).⁷

Di tahun 2013 kebakaran besar terjadi lagi di Riau, hampir 1 juta hektar hutan terkena dampak kebakaran tersebut. Akibatnya bangsa kita dikecam sebagai penyebab polusi udara di negara-negara tetangga, disamping di lingkungan sendiri. Dunia Internasional memandang bangsa Indonesia sebagai pembuat “kabut asap yang menyelimuti hingga jarak seribu mil” di kawasan seluas satu juta kilometer persegi yang dihuni oleh ratusan juta jiwa manusia. Dilihat dari kelompok faktor penyebab kebakaran hutan di Indonesia, faktor alam tampaknya hanya memegang peranan yang sangat kecil, semisal disebabkan oleh petir, letusan gunung berapi, atau batu bara yang terbakar. Sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja.⁸

Kebakaran telah menimbulkan dampak lingkungan luar biasa, 70 juta penduduk diganggu kabut asap kebakaran, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang yang sakit pernapasan, mata dan kulit. Banyak sekolah, kantor dan perusahaan diliburkan, bandara udara ditutup, para turis tidak mau datang. Pandangan dunia yang terbentuk adalah bangsa kita tidak punya rencana untuk memadamkan kebakaran hutan, bahkan tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk memadamkan api termasuk menangkap pelaku yang menimbulkan kebakaran hutan. Citra ini

⁷WH Suryaningsih, “Luas Hutan Indonesia,” http://eprints.undip.ac.id/37877/2/BAB_I.pdf, akses 29 September 2013

⁸Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, (Malang: Banumedia Publishing, 2008), h. 63.

tentunya sangat merugikan kehidupan kita sebagai bangsa yang memiliki hutan tropika yang dipandang sebagai paru-paru dunia.

Satu hal lagi yang membuat kita semua tidak habis berpikir adalah adanya praktek diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus pembakaran hutan di lapangan. Pada prakteknya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Keanekaragaman Hayati dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mampu menjerat (menjaring) para pelaku tingkat bawah atau sering disebut dengan istilah “kelas teri” seperti pelaku pembakaran. Sementara itu para pemodal atau perusahaan yang mempunyai andil besar dalam praktek pembakaran hutan banyak tidak tersentuh oleh hukum, walaupun tersentuh hanya sekedar pelanggaran administratif atau keimigrasian bagi warga asing (WNA).

Di dalam Islam, persoalan pembakaran hutan tidak dijelaskan secara eksplisit dan terperinci. Hal ini menuntut para ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari Alquran dan Hadis, ditambah dengan ijma' dan qiyas dalam membedah persoalan pembakaran hutan. Namun, secara umum hukum Islam telah mengatur mengenai konsep pelarangan tindakan pengrusakan hutan atau pengrusakan lingkungan.

Berikut ayat yang berhubungan dengan pengrusakan hutan:

Surah QS. Al-Baqoroh: 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ ٢٠٥

Artinya : “ Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (QS. Al-Baqoroh: 205).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah memberi kepercayaan kepada manusia untuk menjadi pengelola bumi (khalifah fil ardi), bukan kepada makhluk-nya yang lain. Seharusnya manusia mampu menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Islam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut bidang kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam pengrusakan hutan termasuk didalamnya masalah pembakaran hutan.

Berangkat dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di negeri ini, mengakibatkan masih bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk menjarah hutan. Hal ini memaksa kita semua (termasuk penulis) untuk melihat dan meneliti kembali kebijakan-kebijakan hukum dalam rangka perlindungan hutan. Dengan mengangkat judul: **TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, penulis mencoba melakukan analisis sanksi bagi pelaku pembakaran hutan sebagai bentuk komitmen dalam memberantas kejahatan kehutanan.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diajukan pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pembakaran hutan dalam UU No. 41 Tahun 1999.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia, dalam hal hukum kehutanan khususnya masalah sanksi pembakaran hutan menurut UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perspektif Hukum Islam. Memberikan kontribusi dalam upaya memberantas aksi pembakaran hutan yang sedang marak terjadi di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk bahan acuan bagi kalangan akademisi yang bergelut di bidang hukum Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan

pengetahuan hukum Islam, khususnya analisis hukum dalam wilayah Fiqh Islam terkait sanksi bagi pelaku pengrusakan hutan.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literature dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Dan Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis uraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

⁹Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika 2000), h. 33

¹⁰ Soerjono Soekanto, et. al., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 15

a. Sumber bahan hukum primer

Berasal dari Al-Quran, hadits, pendapat-pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan kebakaran hutan dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber bahan hukum skunder

Berasal dari buku, jurnal, karya tulis, majalah, bulletin dan bahan tulis lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia diperpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

2. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, hadits, dan buku-buku referensi lainnya).

3. Rekontruksi Data (*Recontrukting*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4. Sistematika Data (*Sistematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang artinya “Menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk di interperestasi data dan pemahaman hasil analis”.¹¹ Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode induktif.

Yang dimaksud dengan metode induktif adalah metode yang merupakan kabalikan dari metode deduktif yang suatu pola fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, pristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus kepada yang bersifat umum.¹²

¹¹ Abdul khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

¹²Metode Pengumpulan Data” (On-line), tersedia di <http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/> (12 Desember 2014)

BAB II

SANKSI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN

A. Gambaran Umum Tentang Kejahatan Pembakaran Hutan

1. Pengertian Pembakaran Hutan dan Jenis Tindak Pidana Kehutanan

a. Pengertian Pembakaran Hutan

Di masa lalu membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak praktek oleh para peladang tradisioanal atau peladang berpindah. Namun karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan.

Di lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan Kebakaran hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja dan tak terkendali. Pada prakteknya proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran.¹³

Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan lebih besar dibanding konversi lahan untuk petanian dan illegal logging.

¹³Jurnalbumi.com>home>peristiwa

Definisi pembakaran hutan menurut pakar kehutanan, Bambang Hero Saharjo.

“ Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.”¹⁴

b. Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Jenis Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut¹⁵:

- 1) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999, yaitu barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi.

¹⁴Saharjo, B.H. 2003. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan. Departemen Silviculture. Fakultas Kehutanan.

¹⁵Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), h. 26.

2) Membakar Hutan

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 41 Tahun 1999).

3) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.

Dalam pasal 78 (3) Undang-undang No 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

4) Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) jo Pasal 38 (4) Undang-undang No 41 Tahun 1999 adalah barangsiapa melakukan

penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa izin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

5) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 (6) jo pasal 50 (3) Undang-Undang No 41 Tahun 1999).

6) Mengembalikan ternak.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

7) Membawa alat-alat berat tanpa izin.

Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling

banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 (8) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999).

8) Membuang benda-benda yang berbahaya.

Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-undang No. 41 Tahun 1999).

9) Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 (12) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 ini yaitu barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa izin pejabat yang berwenang, diancam penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

2. Dasar Hukum Pembakaran Hutan dan Faktor-faktor Penyebab Pembakaran Hutan

a. Dasar Hukum Pembakaran Hutan

1) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (3) huruf d :

“Setiap orang dilarang membakar hutan”

Pasal 78 ayat (3) :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) :

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2) Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan UU PPLH sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH:

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Pasal 108 UUPPLH :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 69 ayat (2) UUPPLH :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing”.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) :

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (2) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (3) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (2) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (3) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”.

Pasal 119 UUPPLH:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

3) Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 56 ayat (1) :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Pasal 108 :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 187 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- a. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- b. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- c. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 189 KUHP

“Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin

tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat- alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5) Peraturan Daerah mengenai Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebagaian besar daratan Provinsi Riau sehingga mendesak dibuatnya beberapa peraturan daerah guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Adapun peraturan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Riau yang berkaitan dengan Karhutla yaitu:

- a. PERGUB Riau Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.
- b. PERGUB Riau Nomor. 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengndalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

b. Faktor-faktor Penyebab Pembakaran Hutan

1. Pengertian Hutan dan Pembagian Hutan

a) Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah

tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya (Black, 1979: 584), namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dangler yang diartikan dengan hutan, adalah

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).”
(Ngadung, 1975: 3)

Menurut Dangler yang menjadi ciri hutan adalah:

(1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.

Definisi diatas, senada dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Di dalam pasal itu yang diartikan dengan hutan ialah suatu

lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

Sedangkan pengertian hutan merupakan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan,
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna,
3. Unsur lingkungan, dan
4. Unsur penetapan pemerintah

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan utuh.

Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan itu kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu: (1) agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan, dan (2) mewajibkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil¹⁶.

b) Pembagian Hutan

Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut¹⁷:

¹⁶Salim, H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), h. 41

¹⁷ Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

1. Kawasan hutan konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa), kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam), dan taman buru.
2. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan, dan karena sifat alamnya digunakan untuk: (1) mengatur tata air, (2) mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan (3) memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi: (1) keperluan masyarakat pada umumnya, (2) pembangunan industri, dan (3) keperluan ekspor.

Pasal 1 angka (4 s/d 11) UU No. 41 Tahun 1999, hutan dibagi kepada delapan jenis yaitu¹⁸:

1. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah,
2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah,
3. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat,
4. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan,

¹⁸UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah,
6. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya,
7. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan,
8. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Kerusakan Hutan dan Jenis Kerusakan Hutan

a) Kerusakan Hutan

Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi.

Hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah, yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis¹⁹.

b) Jenis Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan akibat ulah manusia (human destructions)²⁰

1. *Illegal logging* (Penebangan liar).

Penebangan liar bukan saja dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai tindakan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan ini juga dilakukan oleh para pengusaha, bahkan pengusaha yang mendapat ijin HPH/IUPHHK juga melakukan penebangan liar di luar areal yang telah ditentukan. Penebangan liar yang terjadi

¹⁹ Azwarhamid.blogspot.com/2012/10/kerusakan-hutan.html

²⁰ <http://www.atobasahona.com/2016/08/faktor-faktor-penyebab-kerusakan-hutan.html#ixzz4csT21Pqu>

dilakukan pada lahan hutan produksi, hutan lindung, sampai ke dalam kawasan konservasi termasuk di dalamnya kawasan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Suaka alam pun ikut ditebang. Untuk masalah penebangan liar ini harus dipikirkan dan dicari jalan keluarnya secara serius cara penanggulangan, agar hutan tidak dibabat sampai habis.

2. Pembakaran hutan yang disengaja.

Masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, bila kebakaran ini tidak terkendali dapat meluas dan menyebabkan kebakaran hutan yang lebih besar. Dengan cara membakar dianggap pembukaan dan pembersihan lahan lebih mudah dan murah. Untuk menciptakan kondisi areal pertumbuhan yang baik pohon kayu putih pada hutan alam sering dilakukan pembakaran untuk mempermudah tumbuhan tersebut memperbaharui diri memunculkan tunas-tunas baru.

3. Perambahan hutan.

Perambahan hutan oleh masyarakat untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan membabat dan menebang pohon merusak kondisi hutan alam. Masyarakat mengambil hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hutan dengan cara merusak. Ada juga

perambahan hutan dilakukan karena diperalat oleh para “cukong” untuk mengincar kayu dan membuka lahan kelapa sawit.

4. Perladangan berpindah.

Pengertian dan definisi dari Perladangan berpindah adalah suatu sistem bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara membuka lahan hutan primer maupun sekunder. Perladangan berpindah dilakukan oleh masyarakat tradisional dalam pengolahan lahan untuk menghasilkan bahan pangan. Bercocok tanam secara tradisional dilakukan dengan membuka lahan baru ketika hasil panen dari suatu lahan mulai menurun. Perladangan berpindah adalah warisan turun-temurun karena sudah menjadi tradisi dalam bercocok tanam. Perladangan berpindah memberikan kontribusi yang nyata terhadap kerusakan ekosistem hutan terutama pada pulau-pulau yang berukuran kecil. Selain itu perladangan berpindah dan kebakaran memiliki korelasi yang positif, karena musim berladang umumnya pada musim kemarau. Hasil penelitian menunjukan pada setiap musim kemarau terjadi kebakaran hutan karena faktor pembukaan lahan dengan cara membakar.

5. Pertambangan.

Usaha pertambangan yang dilakukan berbentuk pertambangan tertutup dan pertambangan terbuka. Pertambangan terbuka adalah pertambangan yang dilakukan di atas permukaan tanah. Bentuk Pertambangan ini dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (land impact), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya; termasuk pertambangan yang dilakukan di areal hutan. Pertambangan terbuka menghilangkan semua vegetasi yang berada di permukaan karena tanah akan dieksploitasi dan diangkut untuk mengambil mineral tambang yang terkandung didalamnya.

6. Transmigrasi.

Tujuan utama program transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Namun Kebijakan pemerintah untuk meratakan penduduk ke seluruh pelosok tanah air dengan program ini membawa dampak terhadap kerusakan hutan. Hutan dibuka untuk

dibuat pemukiman transmigrasi, dan tiap transmigran mendapatkan lahan garapan seluas 2 hektar. Hutan primer maupun sekunder dibuka untuk kegiatan program pemerintah transmigrasi ini.

7. Pemukiman penduduk.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan dasar akan perumahan semakin meningkat. Terbatasnya daerah yang dapat digunakan sebagai daerah pemukiman membuat kegiatan ini dilakukan pada areal-areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Daerah-daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dipaksakan untuk dibuat pemukiman. Daerah berlereng terjal yang berbahaya juga ikut menjadi lokasi sasaran pembuatan rumah-rumah penduduk.

8. Pembangunan perkantoran.

Areal perkantoran tidak hanya terdapat pada daerah perkotaan yang ramai. Komplek perkantoran juga dibangun pada lahan-lahan hutan, terutama kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten induk. Kabupaten atau perangkat pemerintahan baru mencari dan membuka lahan hutan untuk membuat kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan

juga untuk areal perkantoran. Pembangunan yang terjadi ini akhirnya perlu dilakukan alih fungsi lahan.

9. Pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan, lapangan udara, pelabuhan kapal, dan lain-lain.

Salah satu penyebab masih banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan karena sulitnya jangkauan transportasi. Indonesia dikenal dengan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.500 pulau, pulau besar maupun kecil. Masih banyak daerah-daerah yang terisolasi dan terbelakang karena belum adanya infrastruktur transportasi yang memadai. Pembangunan infrastruktur perhubungan merupakan hal mendesak yang perlu dilakukan. Namun pembangunan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, adakalanya harus memotong hutan pada kawasan lindung maupun kawasan konservasi. Cukup banyak contoh pembuatan jalan yang melewati daerah Hutan lindung, Kawasan Konservasi, Taman Nasional dan kawasan lainnya yang sebenarnya tidak boleh diadakan penebangan dan pembukaan hutan. Kerusakan hutan lain juga terjadi dalam pembangunan infrastruktur lapangan udara, pelabuhan kapal dan lain-

lain. Pembangunan pelabuhan kapal yang dilakukan di pesisir pantai yang memiliki hutan pantai atau hutan mangrove sering merusak keberadaan hutan-hutan tersebut. Dan banyak contoh lain yang dapat dilihat di sekitar kita, mengenai kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur perhubungan.

10. Perkebunan monokultur.

Pembangunan perkebunan monokultur maupun hutan monokultur termasuk di dalamnya Hutan Tanaman yang dilakukan pada areal yang masih berhutan sering terjadi. Beberapa pengusaha yang hanya mencari keuntungan mengurus ijin konversi lahan menjadi perkebunan atau hutan tanaman, dengan sasaran tegakan tinggal yang ada pada areal tersebut dapat diambil dan dijual sebagai keuntungan. Kemudian mereka melakukan “land clearing” dan menanam tanaman-tanaman sejenis dengan pertimbangan ekonomis. Areal hutan yang terdapat beragam jenis dirubah menjadi tanaman sejenis atau monokultur. Tanaman monokultur ini sangat rentan terhadap bahaya erosi, penyebaran hama dan penyakit, dan penurunan biodiversitas.

11. Perkebunan kelapa sawit.

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia. Investasi perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh pengusaha dari dalam negeri maupun luar negeri terutama dari Malaysia. Dalam pertimbangan ekonomis dianggap sebagai sumber keuntungan yang besar. Beberapa pihak yang pernah terlibat dan merasakan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit menjadi sadar akan dampak negatif dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan. Keseimbangan ekosistem menjadi terganggu akibat penurunan biodiversitas, pencemaran lingkungan dari input peptisida yang berlebihan, sulitnya seresah kelapa sawit terdekomposisi dan pemulihan lahan kepada kondisi semula memerlukan waktu yang sangat panjang.

12. Konversi lahan gambut menjadi sawah.

Proyek pembangunan satu juta hektar lahan gambut menjadi sawah pernah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan mempertahankan swasembada beras. Akibatnya lahan hutan gambut menjadi berkurang dan dampak negatif yang ditimbulkan seperti meningkatnya bahaya kebakaran hutan, memberikan sumbangan

terhadap pemanasan global, berkurangnya keanekaragaman hayati dan dampak negatif lainnya.

13. Penggembalaan Ternak dalam hutan.

Walaupun tergolong kecil bila dibandingkan dengan penyebab kerusakan hutan yang lain, namun penggembalaan ternak di anggap sebagai salah satu penyebab kerusakan. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dengan cara, ternak tersebut mengkonsumsi daun-daun dan semai-semai yang merupakan tumbuhan permudaan sebagai regenerasi dari hutan tersebut. Kerusakan lain yang terjadi juga seperti kerusakan batang akibat gigitan dan gesekan tanduk ternak. Penggembalaan ternak di dalam hutan menyebabkan pemadatan tanah hutan karena diinjak-injak oleh ternak. Hal ini akan mempengaruhi proses infiltrasi atau menyerapnya air ke dalam tanah menjadi berkurang sehingga proses runoff meningkat yang menyebabkan erosi di permukaan tanah.

14. Kebijakan pengelolaan hutan yang salah.

Kerusakan hutan juga dapat terjadi karena kebijakan yang dibuat lebih memperhatikan dampak ekonomis dibandingkan dengan dampak ekologis. Selain itu juga perbedaan persepsi tentang kelestarian hutan kadang

terjadi karena dasar pemahaman yang berbeda. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan hutan yang salah dari pemerintah sebagai suatu “pengrusakan hutan yang terstruktur” karena kerusakan tersebut didukung oleh perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Persepsi dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama mengolah lahan-lahan milik mereka dengan menanam tanaman semusim yang lebih cepat menghasilkan dibanding dengan tanaman berumur panjang termasuk tanaman kehutanan.

Kerusakan hutan akibat alam (natural disasters).

15. Kebakaran hutan.

Kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan hutan yang setiap tahun terjadi di Indonesia, bila musim kemarau berkepanjangan pada suatu daerah. Indonesia ditunding sebagai negara pengeksport asap kebakaran hutan ke negara-negara tetangga. Selain dapat memusnahkan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan fauna di sekitarnya, kebakaran hutan menghasilkan asap yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan keselamatan penerbangan.

Api yang timbul pada kebakaran hutan terjadi akibat gesekan batang atau cabang pohon. Dari penginderaan jauh lewat satelit dapat dilihat "hot spot" yang muncul di dalam areal hutan bila terjadi suatu kebakaran hutan.

Selain musim kemarau yang berkepanjangan sebagai salah satu faktor penyebab terjadi kebakaran hutan, ada juga beberapa faktor pemicu terjadi kebakaran hutan yaitu pembukaan lahan gambut sehingga sinar matahari masuk ke lantai hutan dan menyebabkan areal gambut menjadi kering dan mudah terbakar.

16. Letusan Gunung Berapi.

Bencana alam gunung meletus merupakan suatu daya alam yang dapat merusak hutan dan habitat satwa liar bahkan memusnakan kehidupan yang ada di wilayah tersebut. Gunung meletus adalah gejala vulkanis yaitu peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma adalah campuran batu-batuan dalam keadaan cair, liat serta sangat panas yang berada dalam perut bumi. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Peristiwa vulkanik yang terdapat pada gunung berapi setelah

meletus (post vulkanik), antara lain: terdapatnya sumber gas H_2S , H_2O , dan CO_2 dan Sumber air panas atau geiser. Sumber gas ini ada yang sangat berbahaya bagi kehidupan.

17. Naiknya air permukaan laut dan tsunami.

Permukaan air laut yang naik termasuk didalamnya bencana tsunami dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Hutan-hutan di bagian pesisir menjadi rusak karena aktivitas alam ini. Walaupun hutan-hutan di pesisir dianggap suatu cara untuk mengurangi dampak kerusakan dari tsunami tetapi hutan tersebut juga ikut terkena dampaknya.

3. Kebakaran Hutan dan Faktor Penyebab Kebakaran Hutan di Riau

Kebakaran hutan dan lahan di Riau ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembukaan lahan dengan menggunakan sistem pembakaran. Kurangnya pengawasan dan kontrol dalam sistem pembakaran ini sering menyebabkan api merambat dan menyebar ke tempat lain yang lebih luas di sekitarnya.

Adapun beberapa kejadian alam yang bisa menyebabkan kebakaran hutan terjadi. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam biasanya tidak menimbulkan dampak luas. Dan

biasanya, kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam tidak menimbulkan kerugian sebesar kebakaran hutan yang disebabkan oleh kesengajaan manusia. Berikut beberapa kejadian alam yang bisa memicu timbulnya kebakaran hutan.

- a. Musim kemarau panjang. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat berakibat naiknya suhu di berbagai wilayah termasuk hutan. Suhu yang tinggi tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.
- b. Sambaran petir. Sambaran petir juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi akibat penyebab pemanasan global juga bisa menyebabkan seringnya sambaran petir itu terjadi.
- c. *Ground fire (Tanah Api)*. *Ground fire* merupakan kebakaran yang terjadi di dalam lapisan tanah. Musim kemarau berkepanjangan merupakan penyebab dari kebakaran dalam tanah ini. Biasanya, kebakaran ini terjadi di daerah yang memiliki lahan gambut sehingga lahan gambut tersebut terbakar ketika suhu udara naik seiring kemarau panjang yang terjadi.

Meskipun kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam sangat mungkin terjadi, sayangnya bencana kebakaran hutan yang melanda RIAU setiap tahunnya merupakan bencana yang terjadi akibat kesengajaan manusia.

Kebakaran yang Disebabkan Kesengajaan Manusia. Bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang telah terjadi di Indonesia sejak lama. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah nyatanya belum mampu mencegah bencana serupa terulang di tahun berikutnya. Lalu faktor apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran hutan bila ditinjau dari faktor manusia itu sendiri? Berikut ini penjelasan mengenai penyebab kebakaran hutan akibat faktor manusia.

a. Pembakaran lahan tidak terkendali akan memberikan dampak akibat hutan gundul. Penyebab kebakaran hutan yang terjadi akibat kesengajaan manusia. Pembukaan lahan perkebunan biasanya merupakan latar belakang dilakukannya pembakaran lahan. Dalam skala kecil, kebakaran ini masih bisa diatasi. Sayangnya, jika kebakaran ini merupakann ulah perusahaan besar dan dalam skala besar, akan sangat sulit untuk memadamkan api dalam kebakaran. Kebakaran seperti ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di lahan gambut atau rawa.

b. Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat pemilik lahan. Perusahaan yang ingin mengambil alih lahan dari masyarakat pemilik lahan biasanya melakukan pembakaran terhadap lahan yang disengketakan.

Pembakaran lahan dapat berakibat lahan menjadi terdegradasi sehingga nilai lahan berkurang. Dengan cara tersebut, perusahaan akan lebih mudah merebut lahan dari masyarakat yang memiliki lahan.

c. Protes oleh penduduk lokal. Penduduk lokal yang merasa lahannya direbut juga sering melakukan pembakaran lahan sebagai bentuk protes karena perusahaan perkebunan merebut lahan milik mereka.

d. Faktor ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit biaya biasanya melakukan cara instan untuk membuka lahan. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan baru.

e. Kurangnya penegakan hukum. Meskipun aturan mengenai pembakaran hutan jelas-jelas dilarang, namun karena hukum yang diberikan bagi yang melanggar masih sangat lemah, akibatnya banyak juga oknum yang melanggar aturan dan membakar hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Khusus pembukaan lahan untuk pertanian, pembakaran ini dilakukan oleh para petani sebagai upaya untuk membersihkan lahan yang dianggap efektif dan efisien. Dengan membakar lahan maka pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan murah.

selain itu sisa abu pembakaran dapat digunakan sebagai zat yang dapat menaikkan pH tanah yang bersifat asam.

Kondisi ini diperparah dengan adanya beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan *land clearing* dengan sistem pembakaran. Berdasarkan pemantauan satelit *Modis Terra Aqua* yang dilakukan oleh *Eyes on The Forest* (EoF) periode 18 - 21 Oktober 2010 ditemukan 172 titik api di Provinsi Riau, sekitar 82 titik api berada di areal konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) sisanya 90 titik api menyebar di lahan perkebunan sawit, hutan dan padang alang-alang. Dari 82 titik api di HTI terdeteksi 62 berada di konsesi perusahaan yang berafiliasi dengan APP/Sinar Mas Group, kemudian 20 titik api berada di konsesi APRIL Group.

Beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan APP / Sinarmas yang dianalisis EoF berdasarkan satelit Modis yang berkobar oleh kebakaran pada bulan Oktober adalah PT. Tiara Cahaya Delima (Giam Siak Kecil blok), PT. Liwa Perdana Mandiri, PT Ruas Utama Jaya (Senepis blok), PT. Surya Dumai Agrindo, PT Rimba Rokan Perkasa, PT Arara Abadi dan PT Satria Perkasa Agung. Sementara, perusahaan yang berafiliasi dengan APRIL yang berkobar oleh kebakaran adalah di konsesi PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Pusaka Mega. (Usman, 2010).

Selain dilakukan penetapan tersangka kepada perusahaan, pemerintah provinsi riau juga melakukan upaya paksa seperti pencabutan hak pengusahaan hutan, pencabutan izin lingkungan, paksaan pemerintah untuk menguasai lahan dan pembekuan izin.

c. **Bentuk Sanksi Tindak Pidana Kehutanan**

Tindak pidana kehutanan adalah “perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya”

Daftar Bentuk Tindak Pidana Bidang Kehutanan dalam Ketentuan UU No. 41 Th. 1999 ttg Kehutanan²¹

Perbuatan yang dilarang:

a. Pasal 50

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:

²¹Pasal 50 dan Pasal 78, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Merambah kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
 - 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.(Pasal 50 ayat (3) huruf c)
- d. Membakar hutan;
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyipkan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipugut secara tidak sah;

- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri;
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Pidana UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

b. Pasal 78

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf I, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j,

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

15. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

B. Ketentuan Tentang Jarimah Tindak Pidana Pembakaran Hutan

a. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Hutan

Hutan merupakan salah satu karunia terbesar yang diberikan oleh Allah SWT yang diberi kepada umat manusia. Allah menciptakan hutan untuk dikelola sebaik-baiknya oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini beberapa ketentuan syariah Islam terpenting dalam pengelolaan hutan:²²

1. Pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara saja, bukan oleh pihak lain (misalnya satwa atau asing).

²²<http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/pengelolaan-hutan-berdasarkan-syariah.html>

Pengelolaan hutan menurut syariah hanya boleh dilakukan oleh negara (Khalifah), sebab pemanfaatan atau pengelolaan hutan tidak mudah dilakukan secara langsung oleh orang per orang, serta membutuhkan keahlian, sarana, atau dana yang besar. Dikecualikan dalam hal ini, pemanfaatan hutan yang mudah dilakukan secara langsung oleh individu (misalnya oleh masyarakat sekitar hutan) dalam skala terbatas di bawah pengawasan negara.

2. Pengelolaan hutan dari segi kebijakan politik dan keuangan bersifat sentralisasi, sedangkan dari segi administratif adalah desentralisasi (ditangani pemerintah provinsi/wilayah).
3. Negara memasukan segala pendapatan hasil hutan ke dalam Baitul Mal (Kas Negara) mendistribusikan dananya sesuai kemaslahatan rakyat dalam koridor hukum-hukum syariah.
4. Negara melakukan kebijakan hima atas hutan tertentu untuk suatu kepentingan khusus. Hima artinya kebijakan negara memanfaatkan suatu kepemilikan umum untuk suatu keperluan tertentu, misalnya untuk keperluan jihad fi sabilillah. Maka dari itu, negara boleh melakukan hima atas hutan Kalimantan misalnya, khusus untuk pendanaan jihad fi sabilillah. Tidak boleh hasilnya untuk gaji dinas kehutanan, atau untuk membeli mesin dan sarana kehutanan, atau keperluan apa pun di luar kepentingan jihad fi sabilillah.
5. Negara wajib melakukan pengawasan terhadap hutan dan pengelolaan hutan. Fungsi pengawasan operasional lapangan ini

dijalankan oleh lembaga peradilan, yaitu Muhtasib (Qadhi Hisab) yang tugas pokoknya adalah menjaga terpeliharanya hak-hak masyarakat secara umum (termasuk pengelolaan hutan). Muhtasib misalnya menangani kasus pencurian kayu hutan, atau pembakaran dan perusakan hutan. Muhtasib bertugas disertai aparat polisi (syurthah) di bawah wewenangnya. Muhtasib dapat bersidang di lapangan (hutan), dan menjatuhkan vonis di lapangan. Sedangkan fungsi pengawasan keuangan, dijalankan oleh para Bagian Pengawasan Umum (Diwan Muhasabah Amah), yang merupakan bagian dari insitusi Baitul Mal.

6. Negara wajib mencegah segala bahaya (dharar) atau kerusakan (fasad) pada hutan. Dalam kaidah fikih dikatakan, “Adh-dlarar yuzal”, artinya segala bentuk kemudharatan atau bahaya itu wajib dihilangkan. Nabi SAW bersabda, “Laa dharara wa laa diraara.” (HR Ahmad & Ibn Majah), artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Negara wajib juga melakukan konservasi hutan, menjaga keanekaragaman hayati (biodiversity), melakukan penelitian kehutanan, dan sebagainya.
7. Negara berhak menjatuhkan sanksi ta'zir yang tegas atas segala pihak yang merusak hutan. Orang yang melakukan pembalakan liar, pembakaran hutan, penebangan di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam pelanggaran lainnya terkait hutan wajib diberi sanksi ta'zir yang tegas oleh negara (peradilan). Ta'zir ini dapat berupa

denda, cambuk, penjara, bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya. Prinsipnya ta'zir harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan merusak hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara. Seorang cukong illegal logging, misalnya dapat digantung lalu di salib di lapangan umum atau disiarkan TV nasional. Jenis dan kadar sanksi ta'zir dapat ditetapkan oleh Khalifah dalam undang-undang, atau ditetapkan oleh Qadhi Hisbah jika Khalifah tidak mengadopsi suatu undang-undang ta'zir yang khusus.

Namun dalam praktek pengelolaan hutan kebanyakan manusia selalu mengabaikan kelestarian lingkungan manusia selalu mengedepankan keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari sebuah hutan tanpa memikirkan dampak ekologis yang akan terjadi. Keserakahan dan nafsu manusia illegal logging, pembakaran hutan, perambahan dan ahli fungsi hutan. Akibatnya terjadi kerusakan hutan di bumi, salah satunya adalah banjir yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Banjir terjadi karena air hujan yang tercurah di muka bumi tidak dapat ditahan dengan baik oleh tajuk pepohonan dan tumbuhan bawah. Perbuatan merusak hutan merupakan sebuah bentuk kemaksiatan, karena dapat menimbulkan mudarat yang sangat besar bagi makhluk hidup yang lainnya.²³

Yaitu firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 205:

²³ www.KMNU.or.id/konten-181-larangan-merusak-hutan-dalam-islam.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ٢٠٥

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah: 205)

Yaitu firman Allah dalam Surah Al-Qashash (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
٧٧

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qashash: 77)

Dan dalam Surah Al-Rum Ayat 41, Allah juga berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا ۖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS. Al-Rum: 41)

Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar di masa yang akan datang terletak pada sikap dan perilaku penyimpangan, masyarakat, yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Tindakan yang membawa kerusakan (mudarat), cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan, karena tindakan seperti ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak diperbolehkan membuat kemadharatan pada diri sendiri dan kemadharatan pada orang lain"²⁴.

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa kita mestilah menolak kerusakan, dan sebaliknya kita mesti memelihara kemaslahatan umum. Demikian juga syariat tidaklah diciptakan melainkan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia masa kini dan masa yang akan datang, dan menolak kemafsadatan dari mereka. Seandainya hutan-hutan itu ditebang dengan semena-mena, dirusak dengan semaunya, maka pada dasarnya perlakuan itu adalah pelanggaran, yaitu

²⁴Muchlis Usman, kaidah-kaidah ushuliyah dan fihiyyah, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002), h.132

suatu pelanggaran berupa perampasan hak orang-orang lain dan generasi yang akan datang.²⁵

b. Jenis-Jenis Jarimah

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-qur'an atau Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam yakni:

1. Jarimah *Hudud* yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah), yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun. Meliputi zina, *qadzaf* (menuduh zina), pencurian, perampokan, pemberontakan, minuman keras, *riddah* (murtad).
2. Jarimah *Qishash* *Diyat* yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis hukumannya adalah qishash (pembalasan setimpal) dan diyat (ganti rugi). Hukumannya ditentukan oleh perorangan yaitu korban dan walinya. Meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan salah²⁶.
3. Jarimah *Ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada putusan hakim. Namun hukum ta'zir juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan

²⁵ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gunung Persada Press, 2007, h. 215.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2005). h. 14

maksiat, melainkan awalnya mubah. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaanyapun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil²⁷.

Berdasarkan ketentuan tindak pidana jarimah tindak pidana pembakaran hutan termasuk dalam jarimah ta'zir karena perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada putusan hakim.

c. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Merusak Hutan dalam Islam

Sebagaimana penulis telah kemukakan pada bagian sebelumnya bahwa sanksi ta'zir berkaitan dengan tindak pidana ta'zir yang meliputi tiga macam, yaitu:

1. Tindak pidana hudud atau qishas yang dikukuhkan oleh Al-Quran dan Hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qishas, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinaan atau percobaan pembunuhan.
2. Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Quran dan Hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksi nya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya.

²⁷Achmuza, "pengertian jarimah dan macam-macamnya", artikel, <http://achmuzajack.blogspot.com/2012/04/normal-o-false-false-en-us-x-none.html> diakses tanggal 22-04-2014

3. Kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pembagian tindak pidana ta'zir tersebut, maka pembakaran hutan termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 50 dan Pasal 78 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan cukup efektif untuk menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan, dengan sanksi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau dipenjara selama 15 tahun. Sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.

Dalam kaidah fiqh yang berbunyi: “ Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan

dayapreventif dan represif (al-radd' wa al-jazr) dari hukuman tersebut serta di pertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.²⁸



²⁸M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Op.Cit.* h. 181

BAB III

PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN

A. Deskripsi Isi Undang-undang No 41 Tahun 1999

1. Alasan Dikeluarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999

Dikeluarkannya UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan Baru) harus menyebutkan alasan-alasan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UU Kehutanan Lama). Rupanya yang dijadikan sebagai alasan adalah karena UU kehutanan lama dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengelolaan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan (*menimbang huruf d*). Pada bagian lain, UU Kehutanan lama hanya dianggap belum cukup memberikan landasan hukum bagi perkembangan pembangunan kehutanan. Karena hanya dianggap belum cukup maka pengganti UU Kehutanan Lama hanya dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan datang.

UU Kehutanan Baru dihadirkan bukan untuk meluruskan kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan oleh UU Kehutanan Lama. Di mata UU Kehutanan Baru, UU Kehutanan Lama hanya dianggap sudah tua, tidak cocok dengan tuntutan perkembangan zaman dan oleh karena itu tidak lagi mampu menjadi landasan hukum bagi

perkembangan pembangunan sektor kehutanan. UU Kehutanan lama tidak melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Ia hanya semakin tertatih-tatih mengikuti laju perkembangan keadaan.

Sekalipun begitu, UU Kehutanan Baru juga mengakui bahwa sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, kondisi hutan cenderung menurun (*menimbang huruf b*). Namun kondisi tersebut tidak disebutkan sebagai akibat dari pemberlakuan UU Kehutanan Lama. Tidak ada penjelasan sama sekali apa yang menyebabkan hutan cenderung menurun. Kondisi ini seolah-olah terjadi tanpa penyebab.

Kuat dugaan, bahwa cara UU Kehutanan Baru menjelaskan kehadirannya telah memengaruhi cara pandang dan orientasinya, yang bisa ditangkap dari rumusan-rumusan redaksionalnya. Cara pandang dan orientasi itu pada akhirnya memengaruhi pengaturan mengenai hak dan ketertiban masyarakat lokal dan pengelolaan hutan.²⁹

2. Tujuan Dikeluarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999

UU No 41 Tahun 1999 bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan³⁰:

- a) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

²⁹ Rikardo Simarmata, Andiko, Asep Yunan Firdaus Dkk, *Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi*, (Jakarta: Koalisi Untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan, 2007)

³⁰ UU No 41 Tahun 1999 Pasal (3)

- b) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Sistematika sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999

- a) Bab I (Ketentuan Umum)
- b) Bab II (Status dan Fungsi Hutan)
- c) Bab III(Pengurusan Hutan)
- d) Bab IV (Perencanaan Kehutanan)
- e) Bab V (Pengelolaan Hutan)
- f) Bab VI (Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Serta Penyuluhan Kehutanan)
- g) Bab VII (Pengawasan)
- h) Bab VIII (Penyerahan Kewenangan)

- i) Bab IX (Masyarakat Hukum Adat)
- j) Bab X (Peran Serta Masyarakat)
- k) Bab XI (Gugatan Perwakilan)
- l) Bab XII (Penyelesaian Sengketa Kehutanan)
- m) Bab XIII (Penyidikan)
- n) Bab XIV (Ketentuan Pidana)
- o) Bab XV (Ganti Rugi dan Sanksi Administratif)
- p) Bab XVI (Ketentuan Peralihan)
- q) Bab XVII (Ketentuan Penutup)

Jumlah keseluruhan Pasal sebagaimana yang terdapat dalam Rancangan UU No 41 Tahun 1999 tersebut adalah sebanyak 84 Pasal.³¹

B. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

Di dalam berbagai peraturan pelaksanaan tersebut hanya memuat dua macam sanksi: sanksi pidana dan sanksi administratif, sedangkan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata belum diatur secara khusus dalam berbagai peraturan di atas. Tetapi di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan.³²

³¹ UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³² Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 147

Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu:

1. Sanksi administratif (pasal 80 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999);
2. Sanksi pidana (pasal 79 UU Nomor 41 Tahun 1999);
3. Tanggung jawab perdata dan ganti rugi (Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).

Ketiga hal itu akan dijelaskan berikut ini.

a. Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu cara penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling efektif. Karena dalam penerapan sanksi ini tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, sebagaimana menggunakan prosedur biasa. Pejabat yang berwenang, seperti Menteri Kehutanan atau Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dapat menjatuhkan sanksi secara sepihak terhadap:

1. Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan (HPH/HPHTI);
2. Pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
3. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungut (pasal 80 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999).

Ada tiga unsur yang harus ada, supaya pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu (1) adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, (2) tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan dan (3) adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin eksploitasi hutan lainnya (Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi Pelanggaran di Bidang Kehutanan).

Ada lima golongan sanksi yang dapat dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran di bidang eksploitasi hutan:

1. Penghentian Pelayanan Administratif

Penghentian pelayanan administratif merupakan upaya dari Menteri kehutanan atau Kamtor Wilayah Departemen Kehutanan untuk menghetikan pelayanan administrasi yang bersifat sementara terhadap terhadap pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan.

2. Penghentian Penerbangan untuk Jangka Waktu Tertentu

Pemegang izin HPH atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi penghentian penebangan untuk jangka waktu tertentu.

Penghentian penebangan untuk sementara ini dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang berat bagi perusahaan, karena penghentian akan berakibat ruginya perusahaan. Padahal tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

3. Pengurangan Target Produksi

Yang dimaksud dengan sanksi pengurangan target produksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang izin Hak Pengusaha Hutan atau pemegang izin

eksploitasi hutan lainnya yang telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.

4. Saksi Denda

Saksi denda adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi denda juga diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri. Sanksi ini baru dilakukan apabila pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan Taman Industri telah melakukan tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian yang mengakibatkan rusaknya hutan tanaman industri. Pengenaan denda ini ditentukan sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan yang ditimbulkannya.

Pengenaan sanksi denda tidak akan menghapus kewajiban dari perusahaan untuk membayar Iuran Hasil Hutan, Dana Reboisasi, dan Iuran Hak Pengusaha Hutan. Jadi, ada empat kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang melanggar kewajiban-kewajiban yang ditentukan kepada negara, yaitu: denda, Iuran Hasil Hutan, Dana Reboisasi, dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan.

5. Pencabutan Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau izin Eksploitasi Hutan Lainnya(Pasal 2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1989).

Sanksi pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan atau izin eksploitasi hutan lainnya merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan yang telah melakukan pelanggaran berat di bidang eksploitasi hutan. Sanksi pencabutan izin ini diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 393/Kpts-II/1994 tentang Perubahan Pasal 5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan.

Pencabutan izin Hak Pengusaha Hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya pada huruf a sampai huruf f baru dilakukan setelah diberi peringatan berturut-turut tiga kali dengan jangka waktu setiap peringatan 30 hari, sedangkan pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan pada huruf g sampai huruf j dilakukan tanpa peringatan apabila Hak Pengusahaan Hutan telah melanggar ketentuan tersebut.

Tata cara pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan diatur dalam pasal 3 keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1989 tentang tata cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran di Bidang Eksploitasi hutan.

Tata cara pencabutannya sebagai berikut.

- a. Peringatan diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan jangka waktu setiap peringatan 30 hari. Peringatan ini diberikan oleh Direktur Jenderal Pengusaha Hutan atas nama Menteri Kehutanan kepada pemegang izin Hak Pengusaha Hutan.
- b. Pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan yang mendapat peringatan wajib menanggapi dengan menteri yang sesuai dengan peringatan yang diterimanya.
- c. Jika pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan tidak memberikan tanggapan dan penjelasan atas peringatan pertama dan kedua kepada Menteri Kehutanan, tidak diberikan peringatan berikutnya dan izin Hak Pengusahaan Hutannya dapat dicabut.
- d. Berdasarkan bukti-bukti atau penilaian pemeriksaan lapangan atau setelah melalui proses peringatan, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan mengajukan usul pencabutan Hak Pengusahaan Hutan kepada Menteri Kehutanan.
- e. Berdasarkan usul Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan tersebut Menteri Kehutanan dapat menetapkan keputusan pencabutan Hak Pengusahaan Hutan.

Di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri diatur juga tentang sanksi pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tidak hanya mengatur sanksi pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, tetapi juga mengatur sanksi pengurangan luas areal kerja dan denda.

Ada dua sebab penjatuhan sanksi pengurangan luas areal kerja: (1) dalam jangka waktu lima tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tidak menanam tanaman sedikit-sedikitnya 1/10 dari luas areal yang diberikan, dan (2) dalam jangka waktu 25 tahun tidak menanam seluruh areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang telah diberikan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990).

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 mengatur tiga jenis sanksi: pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, pengurangan luas areal kerja, dan sanksi denda.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Ada dua macam perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari dua segi: kualitatif dan kuantitatif.³³

Dari segi kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*rechts delict*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang (*wet delict*), yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi, karena undang-undang mengancamnya dengan pidana.

Kajian pidana dari segi kuantitatif didasarkan pada segi hukumannya ancaman pidananya. Kejahatan hukumnya lebih berat, sedangkan pelanggaran hukumannya lebih ringan.

Perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, sedangkan pelanggaran diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

Ada 4 macam hukuman yang diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985, yaitu: (1) hukuman penjara, (2) hukuman kurungan, (3) hukuman denda, dan (4) perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Keempat hal ini dijelaskan berikut ini.

³³ Sutami Siti. Pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia. Jakarta: Karunia Universitas Terbuka. 1987

1. Hukuman Penjara

Hukuman penjara berupa hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Maksimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah 20 tahun (Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sedangkan Hukuman penjara yang berkaitan dengan kehutanan diatur dalam Pasal 78 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

Ada 10 kategori perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda, yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut.

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan.

Dalam pasal 78 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan dua jenis perbuatan pidana yang dapat dihukum, yaitu (1) dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999), dan (2) dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999).

Kategori orang yang dapat dihukum yang dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan ini adalah setiap orang yang diberikan izin, terutama (1) izin usaha pemanfaatan kawasan hutan (2) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, (3) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, (4) izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan

kayu. Orang yang dengan sengaja merusak prasarana dan perlindungan hutan, dan orang atau badan hukum yang diberikan izin usaha dalam bidang kehutanan dengan sengaja menimbulkan kerusakan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Membakar hutan

Ada dua kategori perbuatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) sengaja membakar hutan dan (2) karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan. Sanksi terhadap kedua perbuatan itu adalah berbeda. Bagi orang yang sengaja membakar hutan dihukum dengan hukuman berat, yaitu penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sedangkan yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus rupiah);

c. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal

Dalam Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan dua jenis perbuatan pidana yang dilanggar, yaitu: (1) melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e, dan (2) melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f.

Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, yaitu (1) barangsiapa; (2) menebang pohon; (3) memanen atau memungut hasil hutan; (4) di dalam hutan; (5) tanpa hak atau izin dari

pejabat yang berwenang. Sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana yang disebutkan Pasal 50 ayat (3) huruf f adalah (1) barangsiapa; (2) menerima membeli atau menjual; (3) menerima tukar atau menerima titipan; (4) atau memiliki hasil hutan; (5) diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan; (6) yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- d. Melakukan penebangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin

Ada dua jenis pasal yang dilanggar yang diatur dalam Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) Pasal 38 ayat (4), dan (2) Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Nomor 41 Tahun 1999. Unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) barangsiapa; (2) melakukan penambangan; (3) pola terbuka; dan (4) di kawasan hutan lindung. Unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) barangsiapa; (2) melakukan kegiatan; (3) penyelidikan umum atau eksplorasi; (4) eksploitasi (pengambilan); (5) barang tambang; (6) dalam kawasan hutan; (7) tanpa izin Menteri.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

e. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan

Pasal 78 ayat (6) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). “ Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal ini: (1) Barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) mengangkut; (4) menguasai atau memiliki hasil hutan; (5) tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahny hasil hutan. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

f. Mengembalikan ternak

Dalam Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan hanya satu pasal yang dilanggar, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf i. Unsur-unsur perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) mengembalikan ternak; (4) didalam kawasan; (5) tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang bewenang. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

g. Membawa alat-alat berat tanpa izin

Pasal 78 ayat (8) UU Nomor 41 Tahun 1999 menentukan satu pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf j. Unsur-unsur pidana yang tercantum dalam pasal ini, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) membawa alat-alat berat atau lainnya; (4) yang tak lazim atau patut diduga; (5) akan digunakan untuk menangkut hasil hutan; (6) dalam kawasan hutan; (7) tanpa izin pejabat yang berwenang. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

h. Membawa alat-alat yang lazim digunakan

Didalam Pasal 78 ayat (9) ditentukan satu Pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf k. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam kedua ketentuan ini, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) membawa alat-alat yang lazim digunakan; (4) untuk menebang, memotong atau membelah pohon; (5) dalam kawasan hutan; (6) tanpa izin pejabat yang berwenang. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

i. Membuang benda-benda yang berbahaya

Unsur-unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam pasal 78 ayat (10) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) membuang benda-benda; (4) menyebabkan kebakaran; (5)

kerusakan; (6) membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan; (7) dalam kawasan hutan. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

j. Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi

Supaya pelaku dapat dihukum berdasarkan Pasal 78 ayat (10) maka ada tujuh unsur yang harus dipenuhi, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut; (4) tumbuh-tumbuhan dan satwa liar; (5) yang dilindungi UU; (6) berasal dari kawasan hutan; (7) tanpa izin dari pejabat yang berwenang (baca Pasal 50 ayat 3 huruf m UU Nomor 41 Tahun 1999). Apabila ketujuh unsur itu terpenuhi, pelaku yang dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kedua hukuman penjara dan denda yaitu dapat ditetapkan secara bersamaan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan.

Kualifikasi pidana diatas, dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori kejahatan adalah

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan;

2. Membakar hutan;
3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal;
4. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin;
5. Mengusahai dan memiliki hasil hutan tanpa surat;
6. Mengembalikan ternak;
7. Membawa alat-alat yang lazim digunakan;
8. Membuang benda-benda yang berbahaya;
9. Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Yang termasuk dalam kategori pelanggaran adalah membawa alat-alat berat atau lazim digunakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Disamping itu, di dalam PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan juga diatur tentang sanksi, terutama sanksi atau hukuman penjara pendapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana dibidang kehutanan.

Perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 1985, sedangkan pelanggaran diatur dalam pasal 18 ayat (4) dan syarat (5) PP Nomor 28 Tahun 1985.

Ada tiga kategori perbuatan pidana yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985:

- a. mengerjakan atau menduduki kawasan hutan lindung atau hutan cadangan tanpa izin menteri kehutanan (baca pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985);
- b. melakukan penebangan pohon-pohon dalam kawasan hutan lindung tanpa izin dari pejabat yang berwenang (baca pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985);
- c. membakar hutan (baca pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985).

Maksimum hukuman penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar ketiga perbuatan tersebut adalah 10 Tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,00 . Hakim dapat menjatuhkan hukuman itu, apakah hukuman penjara atau denda. Jadi, bukan kumulatif.

Ada dua kategori perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985:

- a. mengerjakan dan menduduki kawasan hutan yang bukan hutan lindung tanpa izin Menteri kehutanan (baca pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985). Yang bukan hutan lindung adalah seperti hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata;
- b. melakukan penebangan pohon-pohon dalam kawasan hutan yang bukan hutan lindung (baca Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985). Maksimum hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah 5 tahun atau denda Rp20.000.000,00.

Hukuman penjara juga diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hukuman penjara yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 maksimum 10 tahun dan atau denda Rp100.000.000,00. Hukuman ini dapat diterapkan secara kumulatif, artinya Hakim dapat menjatuhkan kedua jenis hukum itu kepada terdakwa. Lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Hakim hanya diberikan kewenangan untuk menjatuhkan salah satu hukuman, apakah hukuman penjara atau denda. Sedangkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, maksimum hukuman penjara 10 Tahun dan denda Rp200.000.000,00.

2. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan yang lebih ringan dari hukuman penjara. Hukuman kurungan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

Ada enam macam perbuatan pidana yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985:

- a. Menggunakan kawasan hutan yang menyimpang dari segi fungsi dan peruntukannya tanpa persetujuan dari Menteri Kehutanan (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985);

- b. Melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan dalam kawasan hutan atau hutan cadangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985).

Bahan galian itu berupa pasir, tanah, batu-batuan, dan lain-lain;

- c. Melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam areal yang telah ditetapkan dalam kawasan hukum setelah pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi dari instansi yang berwenang tidak sesuai dengan petunjuk Menteri Kehutanan (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985);

- d. Melakukan pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan dan lahan cadangan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan (Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985). Pengertian kondisi tanah dan lapangan termasuk keadaan topografi, sifat-sifat tanah, dan iklim, sedangkan tegakan adalah keseluruhan pohon yang ada dalam hutan;

- e. Melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak dalam kawasan hutan (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985). Jurang yang harus dilindungi adalah lereng yang punya kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) dan mempunyai

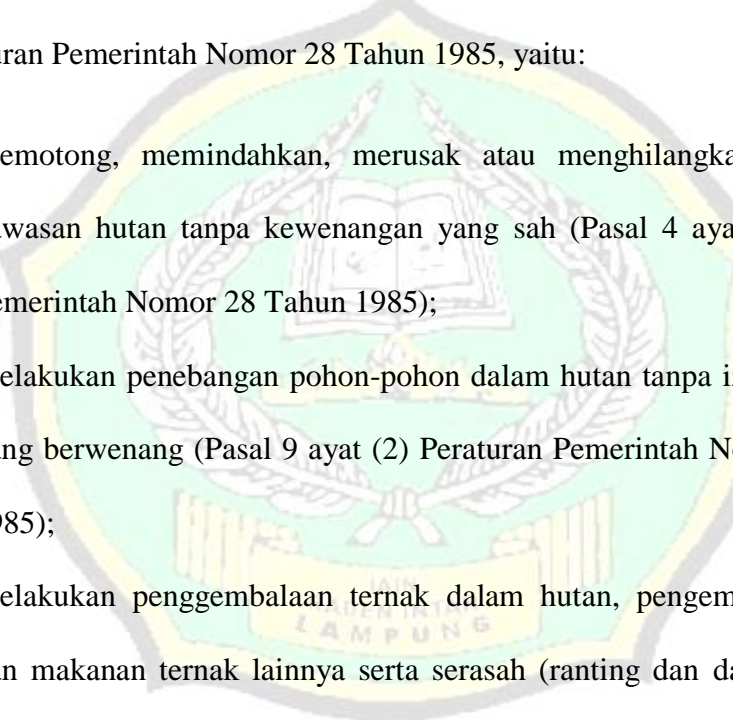
kedalaman sehingga berkurangnya tumbuh-tumbuhan di sekitarnya dan mengakibatkan longsornya lereng;

f. Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.

Keenam macam perbuatan pidana itu dapat dihukum dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ada empat jenis perbuatan pidana yang dapat dihukum menurut Pasal 18 ayat

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, yaitu:

- 
- a. Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan tanpa kewenangan yang sah (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985);
 - b. Melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985);
 - c. Melakukan penggembalaan ternak dalam hutan, pengembalian rumput, dan makanan ternak lainnya serta serasah (ranting dan daun-daun bekas pangkasan) dari dalam hutan yang tidak sesuai dengan yang ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang (Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985);
 - d. Memiliki dan/atau menguasai hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, sedangkan hasil hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutan (Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985). Keempat jenis perbuatan

pidana tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00.

Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp2.500.000,00.”

Ada dua jenis perbuatan pidana yang dituntut berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985:

- a. Mengurangi atau menduduki hutan lainnya tanpa izin dari yang berhak untuk itu (Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985). Yang termasuk dalam kualifikasi hutan lainnya , adalah hutan milik dan bukan hutan milik, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP), Hak Guna Bangunan (HGB), dan sebagainya.
- b. Dengan sengaja membawa alat-alat yang digunakan untuk memotong, menebang pohon di dalam kawasan hutan (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985). Kedua perbuatan pidana tersebut dapat dituntut dengan pidana kurungan selama enam bulan atau denda Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan hukuman untuk membayar sejumlah uang (Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum pidana). Di dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1985 telah ditentukan besarnya denda yang harus dibayar oleh terhukum kepada negara. Besarnya hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000,00 dan minimal Rp2.500.000,00.

Sedangkan di dalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah ditentukan besarnya denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana di bidang kehutanan. Hukuman denda berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hukuman denda yang paling ringan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk itu. Besarnya denda yang dijatuhkan kepada pelaku adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan denda yang paling banyak adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Denda yang paling banyak ini dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Hukuman denda diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara yang dilakukan oleh pelaku, melakukan perbuatan pidana di bidang kehutanan.

4. Perampasan Benda

Hukuman perampasan benda diatur dalam Pasal 18 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Pasal 78 ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999.

Perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terhukum di mana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh negara, seperti parang, kapak, mesin pemotong kayu, dan lain-lain. Tujuan dari perampasan benda itu agar terhukum tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan atau menghancurkan kawasan hutan, hutan cadangan, maupun hutan lainnya.

c. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata atau tanggung gugat perdata tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Namun, tanggung jawab perdata kini telah diatur dalam Pasal 80 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi: "setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang di timbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan."

Ide memasukan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah berasal dari Pasal 1365 KUH perdata.

Di dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 dipertegas siapa-siapa saja yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan biaya apa saja yang dikeluarkan oleh penanggung jawab terhadap kerusakan hutan.

Yang bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan adalah penanggung jawab perbuatan. Penanggung Jawab perbuatan diwajibkan untuk membayar uang ganti rugi kepada negara. Uang ganti rugi yang diserahkan kepada negara adalah untuk biaya : (1) rehabilitas, (2) pemulihan kondisi hutan, (3) tindakan lain yang diperlukan.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata juga diatur tentang ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut arti sempit, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang (ingat ajaran legisme yang berpendapat bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang). Namun, dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum menganut arti luas, sebagaimana yang tercantum dalam rumusan Hoge Raad 1919, bertanggal 31 Januari 1919.

Menurut Hoge Raad 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

1. Melanggar hak orang lain

Yang dimaksud dengan hak orang lain bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain-lain, dan hak-hak absolut seperti hak kebendaan, oktroi, nama perniagaan, hak cipta dan lain-lain;

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang (dalam arti materiil, yaitu aturan yang mengikat secara umum berasal dari kekuasaan yang memiliki wewenang).

Kedalamannya termasuk aturan-aturan yang berasal dari badan-badan publik yang rendah (Provinsi, Kotamadya, Kabupaten, dan lain-lain;

3. Bertentangan dengan kesusilaan. Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Aturan tentang kecermatan secara global terdiri atas dua kelompok, yaitu:

(1) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan (2) aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

Ada empat syarat esensial untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut bersifat melanggar hukum;
2. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan causal);
3. Pelaku tersebut bersalah;
4. Norma yang dilanggar mempunyai “Strekking” untuk mengelakkan timbulnya kerugian (Nieuwenhuis, 1985: 118).

Apabila diperhatikan persyaratan tersebut, tampaklah bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan kepada para tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan, yaitu dengan jalan menebang, menghancurkan, dan atau memusnahkan hutan negara atau hutan lainnya.

Untuk dapat menuntut ganti rugi kepada tergugat, pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan tergugat. Pihak penggugat harus dapat menaksirkan jumlah kerugian yang dideritannya, baik kerugian materiil maupun immateriil. Di samping itu, pihak penggugat juga harus membuktikan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah tergugat secara melawan hukum.

Diwajibkannya pihak penggugat untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah didasarkan pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1865 berbunyi:

“setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Pembuktian terhadap kerusakan atau musnahnya hutan negara atau hutan milik dapat dilakukan dengan mudah oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat, lain halnya dengan pembuktian terhadap pencemaran lingkungan, seperti tercemarnya sebuah sungai oleh sebuah pabrik. Tercemarnya sebuah sungai oleh pabrik akan berakibat timbulnya kerugian bagi masyarakat yang memanfaatkan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya. Untuk membuktikan kerugian yang disebabkan oleh limbah pabrik, pihak penggugat harus dapat membuktikannya. Untuk dapat membuktikan hal itu pihak penggugat mengalami kesulitan karena ia tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hal tersebut. Sehingga banyak sekali gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap pabrik selalu ditolak oleh pengadilan, dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan gugatan yang diajukannya.

Di samping dapat dituntut membayar ganti rugi kepada negara maupun kepada pemilik hutan rakyat kepada tergugat juga dapat dituntut membayar biaya pemulihan kawasan hutan yang rusak kepada negara (lihat Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pembayaran biaya pemulihan kawasan hutan hanya ditunjukkan kepada perusak hutan negara, yang meliputi biaya untuk menanam kembali hutan yang telah gundul.

Pembebanan biaya pemulihan kawasan hutan adalah dimaksudkan agar perusak/tergugat, baik perorangan maupun badan hukum, seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri maupun pemegang izin eksploitasi hutan lainnya dapat mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memperhatikan asas kelestarian lingkungan. Namun, dalam kenyataannya banyak pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan yang merusak kawasan hutan dapat dijatuhkan sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata, yang berupa pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan kawasan hutan pada negara.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pelaku Pembakaran Hutan

Bila ditinjau dan hukum pidana Islam tindak pidana pembakaran hutan merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukumannya terhadap pelaku tindak pidana. Pembakaran hutan dikatakan sebagai jarimah karena perbuatan yang zalim, merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana pembakaran hutan bila ditinjau dan hukum pidana Islam diterapkan hukuman ta'zir.

Sanksi hukuman ta'zir diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-qur'an dan Hadits yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran hutan. Dan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada *waliyyul amri* atau hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan

pembakaran hutan. Menurut Wahbah al-Zuhaili bentuk hukuman ta'zir sangat banyak dan beragam dan semuanya menjadi kompetensi penguasa setempat atau hakim. Hukuman ta'zir diterapkan sesuai dengan kondisi suatu masyarakat atau bangsa. Jadi hukuman pidana pembakaran hutan di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum³⁴.



³⁴Arifmmsmakalah.blogspot.com/2014/12/17

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sanksi Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang

No. 41 Tahun 1999

Penegakan hukum kehutanan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan tanggung jawab perdata. Dengan demikian, penegakan hukum kehutanan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman). Sarana penegakan hukum Administratif, Pidana, Perdata sebagai berikut:

Pertama, sarana Penegakan Hukum Administratif. Di dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memuat tempat jenis sanksi hukum administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (2) yaitu: Sanksi administrasi terdiri atas: (1) Denda; (2) Pencabutan izin; (3) Penghentian kegiatan; dan atau (4) Pengurangan areal.

Kedua, sarana penegakan Hukum Tanggung Jawab Perdata dan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) yaitu: setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai

dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Ketiga, sarana penegakan Hukum Pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ketentuan pidana kehutanan diatur dalam Pasal 78 ayat (3) yang menyebutkan: barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan Pasal 78 ayat (4) yang menyebutkan: barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

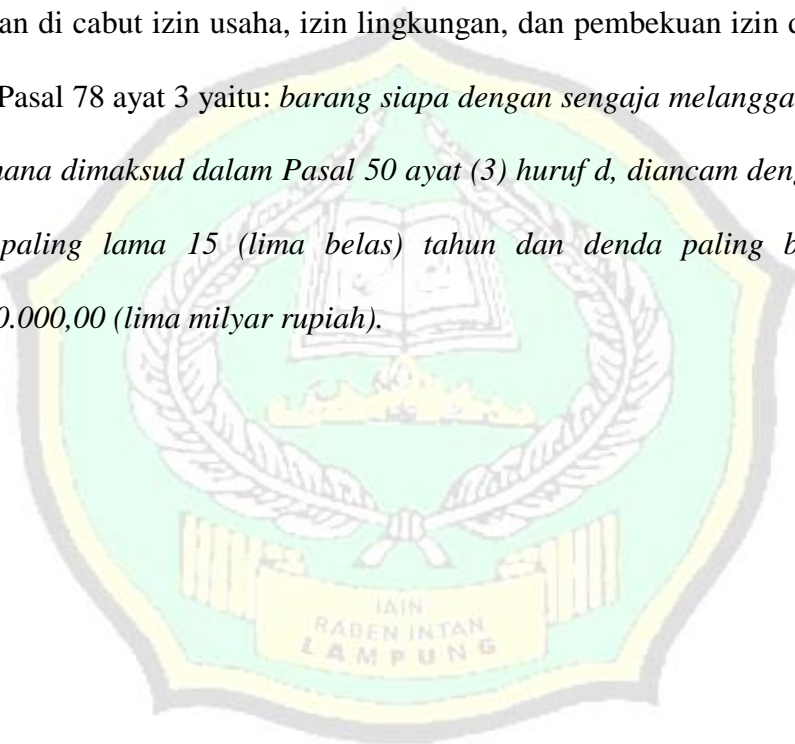
Kebakaran hutan di Riau ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembukaan lahan dengan menggunakan sistem pembakaran. Kurangnya pengawasan dan kontrol dalam sistem pembakaran ini sering menyebabkan api merambat dan menyebar ke tempat lain yang lebih luas di sekitarnya.

Pembukaan lahan untuk perusahaan, pembakaran ini dilakukan dengan membakar lahan maka pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Namun mereka para pengusaha tidak memikirkan dampak yang akan terjadi kepada masyarakat luas khusus nya di kepulauan Riau, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan

masyarakat serta mengganggu transportasi darat, sungai, danau, laut dan udara.

Penjatuan Sanksi terhadap beberapa perusahaan yang dikenakan sanksi administratif yaitu: PT. Tiara Cahaya Delima (Giam Siak Kecil blok), PT. Liwa Perdana Mandiri, PT Ruas Utama Jaya (Senepis blok), PT. Surya Dumai Agrindo, PT Rimba Rokan Perkasa, PT Arara Abadi, PT Satria Perkasa Agung, PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Pusaka Mega.

Akan di cabut izin usaha, izin lingkungan, dan pembekuan izin dan akan dikenakan Pasal 78 ayat 3 yaitu: *barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*



**B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana
Pembakaran Hutan Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang No.
41 Tahun 1999**

Perbuatan melakukan pembakaran hutan merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash (28) ayat 77 Allah telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan.

Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”* (QS. Al-Qashash: 77)

Perbuatan membakar hutan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) karena memenuhi ketiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materil, dan unsur moral. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan kategori tindak pidana (*jarimah*). Di dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh*

Jinayah) suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) terdapat beberapa hukuman yang menyertainya.

Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dalam syariat Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan tersebut lepas dari yang namanya hukuman. Menurut penulis seperti yang telah diuraikan diatas perbuatan membakar hutan termasuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara'. Hukuman ta'zir dapat berupa sanksi terhadap badan (hukuman mati, salib, dan cambuk), sanksi terhadap kemerdekaan seseorang (penjara/kawalan dan pengasingan), sanksi terhadap harta (denda, penyitaan dan penghancuran barang), sanksi lainnya yang ditentukan Ulil Amri atau Hakim demi kemaslahatan umum (peringatan keras dan dihadirkan di persidangan, tegur, dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya, dll), dan akan tetapi perbuatan membakar hutan tersebut tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.³⁵

³⁵Environmental Management Act, 2004, LEAD Journal, Vol. 3/3, h. 594

Untuk menentukan sanksi kepada pelaku pembakaran hutan, dalam kaidah fiqh yang berbunyi: “*berat ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan*”. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangan daya preventif dan represif (*al-radd’ wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.³⁶



³⁶ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h, 181

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasannya yang telah diuraikan di atas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

1. Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dapat ditempuh melalui berbagai sarana penegakan hukum mulai dari sarana penegakan hukum administratif yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2), sarana penegakan hukum tanggung jawab dan ganti rugi pada Pasal 80 ayat (1), serta sarana penegakan hukum pidana 78 ayat (3)(4). Peraturan yang dibuat tersebut sebenarnya sudah memadai akan tetapi penegakan hukum oleh dinas/aparat penegak hukumnya belum berjalan secara optimal dan komprehensif.
2. Perbuatan merusak hutan dengan cara membakar hutan didalam Islam adalah sesuatu yang dilarang. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) yang dikenai sanksi hukuman bagi pelakunya yaitu *jarimah ta'zir* karena perbuatan membakar hutan meskipun tidak secara eksplisit diatur didalam Al-Qur'an maupun Hadis akan tetapi perbuatan tersebut jelas dilarang oleh syara'. Mengenai bentuk hukuman sepenuhnya adalah kewenangan penguasa (*ulil amri*). Hakim diberikan kewenangan dalam

memvonis

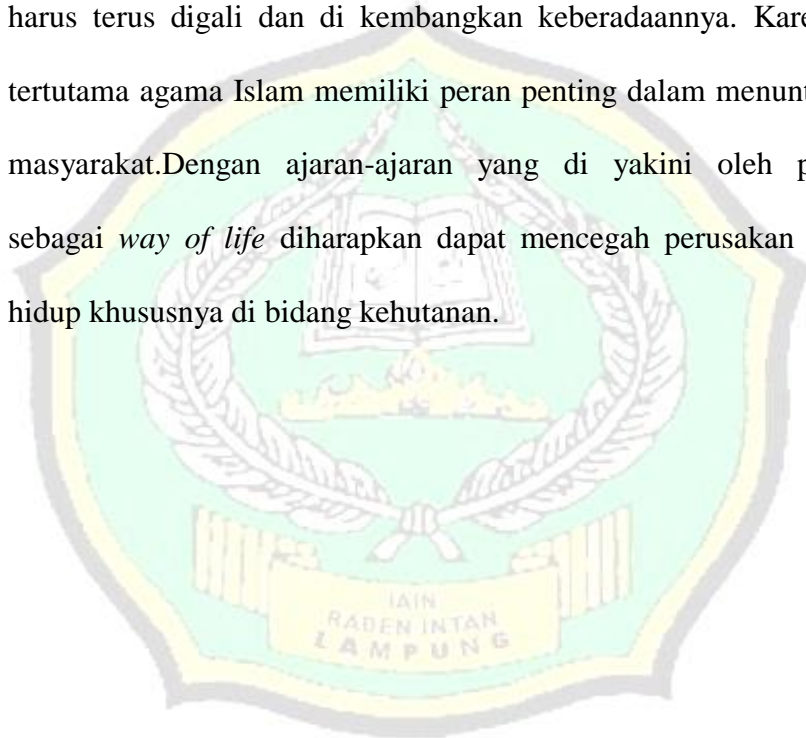
ataupun menentukan jenis hukum yang diberikan kepada pelaku pembakaran hutan. Hakim juga dapat berpegang pada prinsip *kemaslahatan* umat.

B. Saran-saran

1. Keberadaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah mengatur secara baik dan jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan dan pelanggaran di dalam hal kehutanan, namun menurut penulis perlunya penyempurnaan, dikenakan Undang-Undang ini salah satunya belum mengatur secara detail perihal tindak pidana pembakaran hutan khususnya kriteria dalam pemberian sanksi.
2. Memperbaiki kembali kinerja aparat penegak hukum karena mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan negara.
3. Memberikan sanksi yang berat (hukuman mati/penjara seumur hidup) bagi pelaku pembakaran hutan. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan hukum karena sanksi pidananya yang cukup berat.
4. Ditumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa lingkungan hidup secara umum dalam keberadaan hutan secara khusus harus senantiasa

dilindungi dan dijaga secara berkesinambungan dengan tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada perusakan supaya kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat indonesia pada khususnya generasi sekarang maupun masa depan dapat terjamin.

5. Masalah pembakaran hutan (perusakan lingkungan) dalam hukum Islam harus terus digali dan di kembangkan keberadaannya. Karena agama, terutama agama Islam memiliki peran penting dalam menuntut perilaku masyarakat. Dengan ajaran-ajaran yang di yakini oleh pemeluknya sebagai *way of life* diharapkan dapat mencegah perusakan lingkungan hidup khususnya di bidang kehutanan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2005).

Amir, *Ushul Fiqih Jilid 1, Cetakan Keenam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu 1997)

Ash-Shiddiqy Hasby, *falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Campbell Black, Henry. 1979. *Black's Dictionary*. Fifth Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co.

Irfan M. Nurul, Masyrofah, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)

Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradny Paramita, 2004)

Kautur Ranny, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika 2000)

Khadir Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Muchlis Usman, *kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2002)

Muis Yusuf Abdul dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum kehutanan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2011)

Murhaini Suriansyah, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012)

Ngadung, I.B. 1976. *Ketentuan Umum Pengantar ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*. Ujungpandang: Pusat Latihan Kehutanan.

Purbowaseso Ir. Bambang. *Pengendalian Kebakaran Hutan*. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya 2004)

Rikardo Simarmata, Andiko, Asep Yuna Firdaus, dkk. *Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi*, (Jakarta: Koalisi Untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan, 2007)

Saharjo, B.H. 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah Dilakukan*. Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan.

Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013)

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985)

Sutami Siti. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Karunia Universitas Terbuka.

Syaufina Lailan, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, (Malang: Banumedia Publishing, 2008)

Umar Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gunung Persada Press, 2007

Peraturan Perundang-undangan

KUHP

Peraturan Daerah Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Perkebunan

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Website

Achmuza, "pengertian jarimah dan macam-macamnya", artikel,
<http://achmuzajack.blogspot.com/2012/04/normal-o-false-false-en-usxnone.html> diakses tanggal 22-04-2014

Arifmmsmakalah.blogspot.com/2014/12/17

Azwarhamid.blogspot.com/2012/10/kerusakan-hutan.html, <http://www.atobasahona.com/2016/08/faktor-faktor-penyebab-kerusakan-hutan.html#ixzz4csT21Pqu>

Environmental Management Act, 2004, LEAD Journal, Vol. 3/3

<http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/pengelolaan-hutan-berdasarkan-syariah.html>

<http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/pengelolaan-hutan-berdasarkan-syariah.html>

Jurnalbumi.com>home>peristiwa

Metode Pengumpulan Data” (On-line), tersedia di <http://belajarpsikologi.com/metodepengumpulan-data/> (12 Desember 2014)

WH Suryaningsih, “Luas Hutan Indonesia,” http://eprints.undip.ac.id/37877/2/BAB_I.pdf, akses 29 September 2013

www.KMNU.or.id/konten-181-larangan-merusak-hutan-dalam-islam





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : **JENI FITRIA**
NPM/JUR : **1221020064/Jinayah Siyasah**
JUDUL SKRIPSI : **TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
1999 TENTANG KEHUTANAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

No	Tanggal	Permasalahan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing	
				Pemb I	Pemb II
1	09-05-2016	Bimbingan Bab I	Perhatikan penulisan dengan menggunakan spasi dan mengacupadabukupedoman, perbaikirumusan masalah dan tujuan masalah ditatalagisesuaiarah anpembimbing		
2	05-09-2016	Bimbingan Bab I	ACC Proposal		
3	06-09-2016	Bimbingan Bab I	Perbaiki Rencana Outline Ditatalagisesuaiarah anpembimbing		
4	07-09-2016	Bimbingan Bab I	ACC Proposal, Dilanjutkan ke BAB-BAB berikutnya		
5	12-01-2017	Bimbingan Bab I-V	Perbaikidaftartabel, gambar, perbaikidaftar pustaka, dan kesimpulan dibuat pointer sesuai dengan permasalahan		

	21-02-2017	Bimbingan Bab I-V	Perbaiki Abstrak, ACC Bab I-V, Teruskan pemb I agar diarahkan		
6	06-03-2017	Bimbingan Bab I-V	Abstrak dan kesimpulan diperbaiki lagi dengan baik		
7	09-03-2017	Bimbingan Bab I-V	ACC untuk di munaqosahkan		

Bandar Lampung, Maret 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001

